

BAB I

PENDAHULUAN

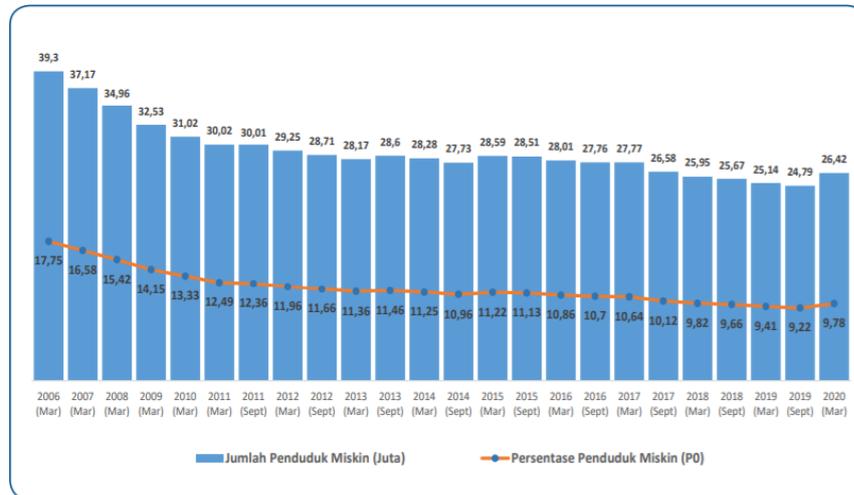
1.1 Latar Belakang

Pada suatu negara yang berkembang seperti negara Indonesia pasti akan di jumpai masalah-masalah yang kompleks untuk ditangani dan terkadang bisa menjadi penghambat jalan untuk menuju tahap selanjutnya seperti menjadi negara maju. Salah satu permasalahan yang menjadi prioritas pemerintah adalah kemiskinan. Tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa menempuh pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya akses ke pelayanan publik, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Masalah kemiskinan ini bukan hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang saja, bahkan sebuah negara yang maju pun memiliki permasalahan ini, namun tidak separah yang dialami oleh negara yang sedang berkembang.

Terdapat indikator utama masyarakat dapat dikatakan miskin jika salah satu berikut ini terpenuhi seperti; (1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) Kurangnya kesempatan kerja; (5) Lemahnya perlindungan terhadap asset usaha dan perbedaanutupah; (6) Terbatasnya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan); (7) Terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) tidak adanya tabungan; (9) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan SDA; (10) tidak adanya asuransi dan jaminan sosial; (11) tidak adanya partisipasi;

(12) Meluasnya korupsi dan lemahnya jaminan rasa aman (BPS, 2017) Menurut A. Candra Dewi dalam (Misdawita & Sari, 2018) menjelaskan bahwa secara umum pengertian kemiskinan dapat diklasifikasikan kedalam 5 kelas, yakni yang pertama kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan sebuah kondisi dimana seseorang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan. Kelas kedua adalah kelas kemiskinan relatif, ialah sebuah kondisi dimana seseorang memiliki penghasilan namun tidak lebih besar daripada yang lainnya, ketiga adalah kelas kemiskinan kultural, kondisi kemiskinan ini terjadi karena prinsip dan sikap seseorang atau sekelompok orang yang tidak mau melakukan usaha untuk memperbaiki taraf kehidupannya meski ada pihak yang bersedia membantu. Yang ke empat adalah kemiskinan kronis, kondisi kemiskinan ini terjadi akibat beberapa hal diluar individu tersebut yang menghambat proses memperbaiki taraf kehidupannya. Hal-hal tersebut diantaranya adalah rendahnya taraf pendidikan, keterbatasan sumberdaya, keterisolasian, rendahnya kualitas kesehatan, kurangnya lapangan pekerjaan. Kelima, adalah kemiskinan sementara, Kondisi ini terjadi disebabkan oleh adanya perubahan siklus ekonomi sebuah Negara, dari kondisi normal menjadi krisis (Id.wikipedia.org, 2023).

Gambar 1. 1 Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2006-2020



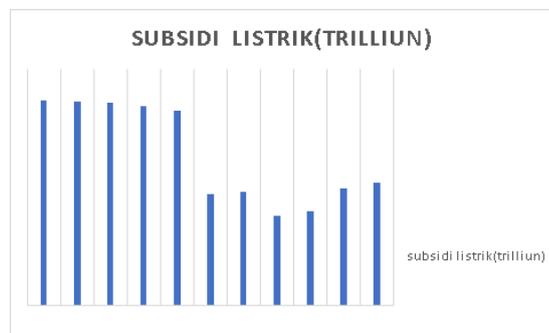
Sumber: BPS Indonesia, 2021

Dari gambar diatas dapat diambil keterangan bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2019 jumlah penduduk maupun presentase kemiskinan di Indonesia selalu mengalami naik turun walau tidak signifikan, akan tetapi di tahun 2020 angka kemiskinan kembali naik sekitar 2 (dua) juta penduduk miskin. Ada berbagai kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan, seperti Subsidi listrik, Raskin (Beras Miskin), dan Subsidi LPG 3Kg.

Salah satu bantuan yang digelontorkan pemerintah unruk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan subsidi listrik yang selama ini banyak tersorot mengenai kurang tepatnya sasaran, sebagian besar dana subsidi jatuh ke orang-orang yang mampu secara ekonomi. Hal lain karena disebabkan kebijakan subsidi listrik saat ini adalah subsidi harga, sehingga semakin besar jumlah konsumsi listriknya semakin besar juga jumlah susbidi listrik yang dinikmati termasuk orang mampu. Dalam APBN, subsidi adalah transfer dana dari Pemerintah yang membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah. Subsidi Listrik bisa diartikan sebagai bentuk bantuan dari Pemerintah agar masyarakat bisa membayar tarif listrik

lebih murah dari tarif kelompok perekonomiannya. Saat ini, tarif kelompok perekonomian listrik adalah sekitar Rp1400-1500/kWh. Namun dengan adanya subsidi dari Pemerintah yang disalurkan melalui PT PLN, maka masyarakat yang menerima subsidi hanya perlu membayar sekitar Rp400-Rp600/kWh, tergantung jenis daya yang digunakan.

Gambar 1. 2 Subsidi Listrik 2010-2020



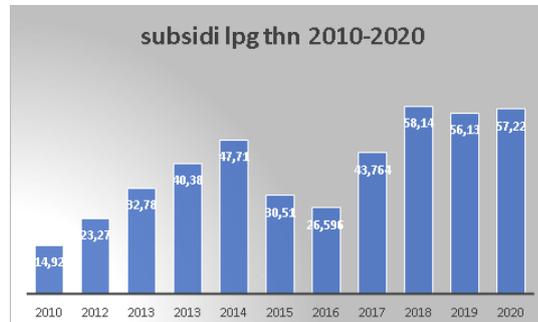
Sumber: (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/subsidi-listrik-naik-487-dalam-rapbn-2020>)

Dari diagram tersebut menjelaskan bahwa 2010 – 2014 mempunyai kestabilan tingkat anggaran yang tinggi. Sedangkan itu upaya pemerintah dalam pengelolaan APBN juga diperhitungkan sehingga pemangkasan juga terjadi pada subsidi listrik ditahun 2015, yang juga akhirnya mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2019. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan alokasi subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp 62,21 triliun. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi kurs Rp 14,4 ribu/US\$ dan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) sebesar US\$ 65/barel. Usulan tersebut lebih tinggi 4,87% dibandingkan alokasi subsidi listrik di APBN 2019 yang sebesar Rp 59,32 triliun. Adapun realisasi subsidi listrik hingga Juli 2019 telah mencapai Rp 30,89 triliun. Rencana kebijakan subsidi listrik dalam RAPBN 2020 dibagi menjadi lima

rencana. Pertama, memberikan subsidi listrik kepada golongan tarif tertentu. Kedua, subsidi listrik diberikan tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 volt ampere (VA) dan rumah tangga miskin dan rentan daya 900 VA, mengacu kepada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPFM). Ketiga, pemerintah juga akan meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan mengurangi disparitas antar wilayah. Rencana keempat adalah efisiensi penyediaan tenaga listrik dan menurunkan komposisi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dalam pembangkit tenaga listrik. Kelima, mengembangkan energi baru dan terbarukan yang lebih efisien, serta menyubstitusi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di daerah- daerah terisolasi. Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwasanya subsidi listrik berdampak signifikan terhadap kemiskinan (Khairi & Aidar, 2018).

Upaya bantuan dari pemerintah yang terkemas dalam subsidi LPG 3Kg juga menjadi sorotan peneliti karena kurangnya ketepatan dalam segi sasaran juga menjadikan kurangnya efektif gelontoran subsidi Lpg 3 Kg ini. Berdasarkan Undang- undang No 27 Tahun 2001 Tentang kegiatan usaha hilir gas, seluruh bisnis ataupun usaha minyak dan gas LPG sudah terbuka bagi pelaku usaha maupun kondisi di pasar yang menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi yang besar dan sekarang menjadi komoditi yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang berbunyi : *“Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung gas 3 kg hanya di peruntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro”*.

Gambar 1. 3 Grafik Subsidi LPG 2010-2020



Sumber: WWW.Kompas.id, 2022

Dari diagram tersebut menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui subsidi Lpg 3Kg mengalami peningkatan dari tahun 2010 – 2014 dikarenakan faktor permintaan lapangan yang terus membeludak, sedangkan ditahun 2015 - 2016 pemerintah mencoba upaya menstabilkan anggran subsidi LPG 3Kg dengan memangkas pagu yang ada, tetapi fakta lapangan membuktikan pemangkasan anggaran tidaklah menjadi solusi, yang mengharuskan pemerintah arus menaikkan Kembali pagu anggaran hingga tahun 2020.

Kebijakan atau program lain dari pemerintah adalah Raskin (Beras Miskin). Program raskin merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, sesuai Peraturan Presiden RI No. 13 tahun 2009, tentang Koordinasi penaggulangan kemiskinan, yang didukung oleh Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2009 tentang tim koordinasi Raskin Pusat. kebijakan Raskin juga belum berjalan sesuai dengan sasaran program, Pada kenyataannya implementasi kebijakan Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat.

Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum/Petunjuk Pelaksanaan Raskin. Padahal program ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu untuk program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan ditingkat rumah. Penyimpangan yang kerap terjadi yaitu tidak tepatnya jumlah beras yang diperoleh para Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat Raskin, yang seharusnya berdasarkan PAGU Raskin setiap RTM menerima beras sejumlah 15 kg tetapi yang diperoleh hanya sekitar 5 kg per RTM/RTS. Hal itu terjadi karena keterbatasan beras yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah warga yang menerima Raskin sehingga menyebabkan mayoritas masyarakat merasa senang namun sebagian kecil juga ada yang merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, hubungan antara subsidi raskin dan kemiskinan juga berpengaruh secara signifikan. Ketika memang alokasi 15 kg beras per-bulan disalurkan secara tepat, dengan presentase mengurangi kemiskinan sekitar 1,22% (Izani & Taufiq, 2022).

Menurut Sondang dalam Othenk (2008) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (Othenk, 2008) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. (Alamsyah, 2017).

Berdasarkan teori efektivitas dan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut juga fenomena yang terjadi menjadikan peneliti tertarik atas penelitian tentang adanya upaya pemerintah dalam memberi subsidi energi yang memuat subsidi listrik serta subsidi Lpg 3Kg untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia diharapkan memberikan pengaruh yang efektif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan judul **“PENGARUH SUBSIDI LISTRIK, SUBSIDI LPG 3KG, DAN SUBSIDI BERAS MISKIN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah subsidi listrik berpengaruh terhadap kemiskinan Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah subsidi Lpg 3Kg berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah subsidi beras miskin (raskin) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

9

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk Mengetahui pengaruh subsidi listrik terhadap tingkat kemiskinan diProvinsi Jawa Timur.
2. Untuk Mengetahui pengaruh subsidi Lpg 3Kg terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh subsidi beras miskin terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai penambah pengetahuan dan informasi mengenai kondisi lapangan kepada pemangku kebijakan terhadap aspirasi masyarakat tentang pengaruhSubsidi listrik, Subsidi LPG 3Kg, serta Subsidi beras miskin terhadap tingkat kemiskinan di provensi Jawa Timur.

Sebagai referensi dalam penelitian yang sejenisnya di masa mendatang.